

POTENSI DAN PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MIKRO

Sugeng Haryanto

Abstraks: Usaha kecil dan mikro merupakan sektor usaha yang telah membuktikan mampu bertahan dalam kondisi krisis. Hal ini disebabkan antara lain kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi yang relatif tinggi selain itu juga disebabkan oleh tingginya kandungan lokal pada faktor produksinya. Namun dalam pengembangan usahanya seringkali banyak mengalami hambatan, salah satunya adalah permodalan yang jumlahnya terbatas atau kecil. Usaha kecil dan mikro umumnya nyaris tidak tersentuh (undeserved) lembaga keuangan formal. Usaha ini dinilai tidak layak bank (not bankable). LKM mempunyai peran yang sangat penting untuk menopang kebutuhan dana bagi industri kecil dan mikro. Lembaga keuangan mikro mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga dapat diakses oleh industri kecil dan mikro. Tulisan ini bertujuan 1) untuk mengkaji peran LKM dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan mikro, 2) untuk mengkaji prospek dan hambatan pengembangan LKM. LKM telah mampu mengambil peran yang signifikan terhadap perkembangan usaha kecil dan mikro. LKM mampu menyediakan kredit dengan persyaratan yang lebih longgar yang memungkinkan usaha mikro dan kecil mampu mengakses permodalan. LKM mempunyai prospek yang baik karena jumlah usaha kecil dan mikro yang banyak, dimana usaha tersebut belum banyak tersentuh permodalannya. Untuk mengembangkan LKM secara berkelanjutan harus dikembangkan secara komersial. sehingga LKM mampu membiayai kegiatannya serta memobilisasi dana masyarakat yang merupakan sumber utama untuk pendanaan kredit mikro. Hambatan yang dihadapi dalam upaya pengembangan LKM berasal dari eksternal: berkaitan dengan kelembagaan dan pembinaannya. internal: aspek operasional dan SDMnya.

Kata kunci: LKM, Usaha kecil dan Mikro

PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu usaha mampu bertahan bukan masalah besar atau kecilnya suatu usaha, tetapi yang lebih penting adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Dalam kondisi lingkungan usaha yang mengalami perubahan dengan cepat, maka *Sugeng Haryanto, adalah Dosen Program D3 Keuangan dan Perbankan Universitas Merdeka Malang*

fleksibilitas suatu usaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan merupakan faktor mutlak agar tetap bertahan.

Usaha kecil dan mikro merupakan sektor usaha yang telah membuktikan mampu bertahan dalam kondisi krisis. Usaha kecil dan mikro mempunyai kemampuan untuk bertahan yang cukup tinggi dalam krisis ekonomi. Hal ini disebabkan antara lain kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi yang relatif tinggi. Selain itu kemampuan bertahan usaha kecil dan mikro disebabkan juga oleh tingginya kandungan lokal pada faktor produksi mereka, baik pada penggunaan bahan baku maupun permodalan. Selain itu, usaha mereka pada umumnya berbasis pada kebutuhan dasar masyarakat luas (Riskayanto dan Sulistiowati, 2008)

Industri kecil dan mikro dalam pengembangan usahanya seringkali banyak mengalami hambatan. Industri kecil dan mikro yang ada saat ini sebagian besar tidak mampu berkembang dengan baik. Usahanya relatif tidak mengalami perkembangan yang berarti dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang menghambat pengembangan usaha kecil dan mikro. Mulai dari sisi sumber data manusia, permodalan, pemasaran serta manajerial.

Faktor yang sangat penting dalam pengembangan usaha kecil dan mikro adalah dari sisi permodalan yang jumlahnya terbatas atau kecil. Dalam pengembangan usaha kecil dan mikro dibutuhkan suntikan permodalan, selain pembinaan dibidang yang lainnya. Suntikan permodalan yang berupa kredit dipahami sebagai suatu injeksi sementara yang harus mampu menciptakan modal bagi kegiatan ekonomi masyarakat kecil dalam meningkatkan produksi atau usaha. Kredit dalam putaran ekonomi suatu saat atau secepatnya harus mampu menciptakan akumulasi modal, meningkatkan surplus serta kesejahteraan penerimaan kredit (Sumodiningrat, 1996).

Usaha kecil dan mikro, seperti halnya masyarakat lapisan bawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh (*undeserved*) dan tidak dianggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, sehingga menyebabkan laju perkembangan ekonominya terhambat pada tingkat subsistensi saja. Kelompok masyarakat ini dinilai tidak layak bank (*not bankable*) karena tidak memiliki agunan, serta diasumsikan kemampuan mengembalikannya rendah, kebiasaan menabung yang rendah, dan mahalnya biaya transaksi. Akibat asumsi tersebut, maka aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah, sehingga kebanyakan mereka mengandalkan modal apa adanya yang mereka miliki (Ismawan, 2003).

Keberadaan LKM tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat, terutama usaha kecil dan mikro. LKM mempunyai peran yang sangat penting untuk menopang kebutuhan dana bagi industri kecil dan mikro. Hal ini tidak lepas dari ketidakmampuan industri kecil dan mikro untuk mengakses perbankan formal. Lembaga keuangan mikro mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga dapat diakses oleh industri kecil dan mikro.

Terdapat hubungan yang signifikan antara perkembangan usaha kecil dan mikro dengan perkembangan LKM. LKM perlu tumbuh dan berkembang agar usaha kecil dan mikro berkembang. Namun demikian untuk mengembangkan LKM bukanlah hal yang mudah, banyak hambatan yang menghadang.

Tulisan ini bertujuan 1) untuk mengkaji peran LKM dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan mikro, 2) untuk mengkaji prospek dan hambatan pengembangan LKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Problem Pengembangan UKM

Usaha kecil didefinisikan menurut *Undang-Undang No. 9 tahun 1995* adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1 milyar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 200 juta (Sudisman & Sari, 1996: 5). Sedangkan menurut *Biro Pusat Statistik (BPS)*, usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (BPS, 1999:250).

Karakteristik yang melekat pada industri kecil adalah: 1) tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. 2) rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaannya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. 3) sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. 4) dilihat menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau (Kuncoro: 2000)

Glendoh (2001) menyatakan bahwa ciri-ciri industri kecil adalah: 1) Industri kecil adalah industri berskala kecil, baik dalam ukuran modal, jumlah produksi maupun tenaga kerjanya. 2) Perolehan modal umumnya berasal dari sumber tidak resmi seperti tabungan keluarga, pinjaman dari kerabat dan mungkin dari "lintah darat". 3). Karena skala kecil, maka sifat pengelolaannya terpusat, demikian pula pengambilan keputusan tanpa atau dengan sedikit pendelegasian fungsi dalam bidang-bidang pemasaran, keuangan, produksi dan lain sebagainya. 4). Tenaga kerja yang ada umumnya terdiri dari anggota keluarga atau kerabat dekat, dengan sifat hubungan kerja yang "informal" dengan kualifikasi teknis yang apa adanya atau dikembangkan sambil bekerja. 5). Hubungan antara keterampilan teknis dan keahlian dalam pengelolaan usaha industri kecil ini dengan pendidikan formal yang dimiliki para pekerjanya umumnya lemah. 6). Peralatan yang digunakan adalah sederhana dengan kapasitas output yang rendah pula.

UKM menghadapi beberapa kendala dalam upaya mengembangkan usahanya. Hambatan yang dihadapi usaha kecil dan mikro antara berupa: manajemen usaha yang belum baik, pemasaran yang terbatas, teknologi yang masih rendah, kualitas SDM yang masih rendah dan kesulitan akses ke lembaga keuangan formal.

Lembaga Keuangan Mikro

Kredit dalam putaran ekonomi suatu saat atau secepatnya harus mampu menciptakan akumulasi modal, meningkatkan surplus serta kesejahteraan penerimaan kredit. Sesuai dengan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat, kredit mikro memiliki esensi yang sangat berbeda dengan kredit komersil, yaitu bahwa kredit mikro merupakan bagian dari suatu proses pemupukan dana jangka panjang yang disebut modal bagi peminjam. Kredit mikro merupakan program kredit dalam jumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, *“programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families”* (Microsummit dalam Wijono, 2005).

Sedangkan pihak atau lembaga yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut LKM (LKM). Menurut *Asian Development Bank (ADB)*, LKM (*microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa: (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang (Wijono, 2005).

Secara umum terdapat tiga elemen penting terkait dengan LKM: 1) menyediakan berbagai jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi. 2) melayani rakyat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas. 3) menggunakan prosedur dan mekanisme kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel (Kreshnamurti, 2005)

PEMBAHASAN

Peran LKM Dalam Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan UKM

Usaha kecil dan mikro telah memegang peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Bank Indonesia (2001) mencatat beberapa peran strategis dari usaha kecil, antara lain: 1) jumlahnya yang besar dan terdapat di setiap sektor ekonomi, 2) Potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja karena setiap investasi pada sektor usaha kecil dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dibanding investasi yang sama pada usaha menengah dan besar, dan 3) memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Berdasarkan sensus Ekonomi yang dilakukan oleh BPS tahun 2006, jumlah UMKM mencapai 48,93 juta unit atau 99,9 persen dari jumlah pelaku usaha

nasional. Kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja mencapai 85 juta atau 96,18% dan kontribusi terhadap GDP mencapai 53,28% (Kompas, 29 Februari 2008). Hal ini menunjukkan begitu pentingnya peran pelaku ekonomi kecil dan menengah dalam menopang perekonomian Indonesia. Berdasarkan realitas ini, keberadaan dan pengembangan ekonomi rakyat terutama pada usaha mikro merupakan hal yang sangat strategis untuk mewujudkan *broad based development* atau *development through equity* (Ismawan; 2003).

Namun demikian usaha kecil dan mikro menghadapi beberapa kendala dalam pengembangan usahanya. Hambatan yang dihadapi oleh usaha kecil dan mikro antara lain terkait dengan: manajemen usaha, pemasaran, teknologi produksi dan permodalan. Untuk mendorong usaha mikro ini memang disadari bahwa modal bukan satu-satunya pemecahan, tetapi tetap saja ketersediaan permodalan yang secara mudah dapat dijangkau mereka sangat vital, karena pada dasarnya kelompok inilah yang selalu menjadi korban eksploitasi oleh pelepas uang. Salah satu sebabnya adalah ketiadaan pasar keuangan yang sehat bagi masyarakat lapisan bawah ini, sehingga setiap upaya untuk mendorong produktivitas oleh kelompok ini, nilai tambahnya terbang dan dinikmati para pelepas uang. Adanya pasar keuangan yang sehat tidak terlepas dari keberadaan Lembaga Keuangan yang hadir ditengah masyarakat.

LKM diyakini merupakan alat pembangunan yang efektif untuk membantu pengentasan kemiskinan. Hal ini karena LKM memungkinkan orang kecil, rumah tangga berpenghasilan kecil untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Sedangkan bagi usaha kecil dan mikro dapat digunakan untuk membantu permodalan usaha di mana para pengusaha kecil dan mikro sulit kesulitan untuk mengakses bank formal. Syukur (2006) menyatakan bahwa gaung peranan kredit mikro untuk menciptakan lapangan kerja mandiri guna mengurangi kemiskinan ini mulai berkembang luas di dunia sejak ikrar *microcredit Summit* di Washington DC tahun 1997.

Usaha kecil dan mikro rata-rata terkendala oleh permodalan, dimana mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengakses permodalan dari lembaga perbankan formal. Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh Usaha kecil dan mikro terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (*rentenir*) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain

Usaha kecil dan mikro tidak mempunyai cukup aset sebagai jaminan dan juga tidak mempunyai catatan pembukuan usahanya yang merupakan salah satu yang disyarat perbankan, selain kebutuhan dana yang biasanya juga tidak terlalu besar. Kondisi demikian membuat mereka kesulitan untuk mengakses permodalan dari bank formal. Problem kesulitan akses usaha kecil dan mikro dapat diatasi LKM dengan menyediakan kredit dengan persyaratan yang lebih longgar yang memungkinkan usaha mikro dan kecil mampu mengakses permodalan.

LKM mempunyai fleksibilitas yang tinggi, biasanya sangat adaptif dengan kondisi lingkungan dimana LKM tersebut beroperasi. LKM mampu melayani melayani masyarakat kecil (usaha mikro dan kecil) karena: 1) Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat; (2) Melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; (3)

Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan.

Berdasarkan kondisi riil usaha mikro dan kecil dan kemampuan yang dimiliki oleh LKM menunjukkan bahwa LKM mempunyai peran sangat strategis. LKM mampu menyediakan dana bagi usaha kecil dan mikro dengan persyaratan administratif yang fleksibel sesuai dengan kondisi usaha mikro dan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan usaha kecil dan mikro.

Prospek dan Hambatan Pengembangan LKM

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak akhir 1997 telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin meningkat. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin berjumlah 39,30 juta, angka tersebut merupakan 17,75 persen dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2006). Fenomena kemiskinan di Indonesia merupakan potret kehidupan masyarakat desa, karena 75 % dari masyarakat miskin berada di pedesaan (Mega, 2004).

Pada saat krisis pula usaha mikro dan kecil telah mampu menunjukkan eksistensinya untuk bertahan. Usaha kecil dan mikro tersebut memegang peran penting sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia. Jumlah usaha mikro semakin bertambah. Dua peran penting usaha kecil yang cukup signifikan adalah kontribusinya dalam investasi dan penyediaan kesempatan kerja (Ikhsan, 2004). Situasi kemiskinan telah membuat tenaga kerja terserap di sektor rumah tangga. Jumlah UMKM, termasuk didalamnya usaha mikro pada tahun 2006 sebesar 48,9 juta, dimana 46 persen dari seluruh pelaku usaha kecil-mikro tersebut merupakan perempuan pengusaha kecil mikro (BPS, 2006).

Perkembangan LKM (LKM) terjadi seiring dengan perkembangan UKM. Dengan jumlah masyarakat miskin dan jumlah usaha mikro dan kecil dan begitu besar, dimana mereka masih menemui hambatan dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal. Pada gilirannya mereka akan mengakses sumber-sumber pendanaan dari LKM. Dengan jumlah orang miskin yang masih tinggi dan usaha kecil dan mikro yang begitu besar merupakan potensi pasar bagi LKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa LKM mempunyai potensi pasar yang sangat besar. Dengan potensi pasar yang besar tersebut merupakan prospek yang cerah bagi perkembangan LKM.

Perkembangan LKM tidak terlepas dari karakteristik LKM itu sendiri yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kecil dan mikro dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan. Walaupun biaya atas dana pinjaman dari lembaga keuangan mikro lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga perbankan. LKM mempunyai nilai lebih sendiri bagi masyarakat miskin dan usaha kecil dan mikro, nilai lebih tersebut antara lain berupa tiadanya jaminan/agunan seperti yang dipersyaratkan oleh perbankan bahkan dalam beberapa jenis LKM pinjaman yang diberikan didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam beserta aktivitasnya sudah dikenal oleh LKM, kemudahan yang lain adalah pencairan dan pengembalian pinjaman yang fleksibel yang juga sering disesuaikan dengan *cash flow* peminjam.

Tabel 1
Beberapa Indikator Perkembangan LKM Pada Oktober 2004

No	Jenis LKM	Jumlah (Unit)	Simpanan (Rp Milyar)	Penyimpanan (Juta rek)	Pinjaman (Rp Milyar)	Jumlah Peminjam (juta Rek)	Rata-rata Pinjaman (Rp Juta)
1	BPR	2,148	9,254.00	5.61	9,431.00	2.4	3.93
2	BRI Unit	3,916	27,429.00	29.87	14,182.00	3.10	4.57
3	Badan Kredit Desa	5,345	0.38	0.48	0.20	0.40	0.00
4	KSP	1,097	85.00	n.a	531.00	0.67	0.79
5	USP	35,218	1,157.00	n.a	3,629.00	n.a	n.a
6	LDKP	2,272	334.00	n.a	358.00	1.30	0.27
7	Pegadaian	264	-	-	157.70	0.02	9.34
8	BMT	3,038	209.00	n.a	157.00	1.20	0.13
9	Credit Union & NGO	1,146	188.01	0.29	505.73	0.40	1.27
		54,444	38,656.39	36.25	28,951.00	9.48	3.05

Sumber: Ismawan dan Budiantoro, 2005.

Jumlah peminjam pada LKM pada tahun 2004 masih sebesar 9,48 juta, jika dibandingkan dengan jumlah usaha mikro dan kecil yang mencapai lebih 40 juta, menunjukkan bahwa potensi pasar LKM masih sangat besar. Menjadi tantangan tersendiri bagi LKM untuk mengembangkan usaha dan jangkauannya sehingga potensi pasar yang masih sangat luas tersebut dapat dioptimalkan.

Untuk mengembangkan LKM secara berkelanjutan (*sustainable*) harus dikembangkan secara komersial dan ini merupakan suatu proses yang tidak mungkin diputar balikkan. hanya dengan pendekatan secara komersial ini lembaga keuangan mikro akan mampu membiayai kegiatannya serta mampu memobilisasi dana masyarakat yang merupakan sumber utama untuk pendanaan kredit mikro (Robinson, 2002). Dengan demikian, selain kredit mikro yang bersifat non-komersial yang tertuju pada golongan masyarakat miskin, adanya kredit mikro komersial sangat dibutuhkan serta sangat prospektif untuk dikembangkan.

LKM memang mempunyai prospek yang bagus ke depan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil, namun demikian bukan berarti untuk mengembangkan LKM bukannya tanpa hambatan. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam upaya pengembangan LKM antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut (Wijono, 2005): 1) Masalah eksternal yang dihadapi oleh LKM adalah aspek kelembagaan, BRI Unit dan BPR sebagai bagian dari LKM secara kelembagaan lebih jelas di bawah pembinaan dari Bank Indonesia sedangkan LKM yang berbentuk koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, ketentuan operasional dan arah pengembangannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Bahkan, bagi LKM lainnya yang berbentuk Bank Kredit Desa, LDKP, *credit union* maupun

lembaga non pemerintah lainnya tidak jelas kelembagaannya dan pembinaannya. 2) Masalah internal yang menyangkut aspek operasional dan pemberdayaan usaha. Masalah pertama menyangkut kemampuan LKM dalam menghimpun dana, sebagian besar LKM masih terbatas kemampuannya karena masih bergantung sedikit banyaknya anggota atau besaran modal sendiri. Kemampuan SDM LKM dalam mengelola usaha sebagian besar masih terbatas, sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi perkembangan usaha LKM bahkan dapat menghambat. Ringkasan permasalahan LKM disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2
Potensi dan Permasalahan yang Dihadapi LKM

Aspek	BPR & BRI Unit	Koperasi	Lembaga uangan Mikr Lainnya
Kemampuan menghimpun dana	Mengandalkan tingkat suku bunga > rata-rata bank umum	Mengandalkan jumlah anggota	Mengandalkan modal sendiri dan anggota
Kemampuan menyalurkan dana	Rasio Loan to Deposit (LDR), namun kualitasnya perlu diperhatikan	Terbatas karena kemampuan SDM dan pengalaman usaha	Terbatas karena kemampuan SDM dan pengalaman usaha
Kemampuan manajemen operasional	Tergantung pada beberapa SDM kunci	Tergantung pada pengurus	Tergantung pada pengurus
Kemampuan menghasilkan laba	Relatif lebih baik dibandingkan bank umum (ROE dan ROA)	Tergantung dari kemampuan dan komitmen anggota	Tergantung dari kemampuan dan komitmen anggota
Kemampuan jaringan dan akses pasar	Fokus pada usaha perdagangan	Masih terbatas	Masih terbatas
Kemampuan perencanaan dan pelaporan	Masih beragam, khususnya BPR yang mempunyai modal terbatas dan yang beroperasi di luar Jawa dan Bali	Masih terbatas	Masih terbatas

Sumber: Didin Wahyudin 2004 dalam Wijono 2005

KESIMPULAN

Keberadaan LKM tidak terlepas dari keberadaan UMK. Usaha kecil dan mikro tidak mempunyai cukup kemampuan untuk mengakses bank formal (unbankable). Berdasarkan kondisi riil usaha mikro dan kecil dan kemampuan yang dimiliki oleh LKM menunjukkan bahwa LKM mempunyai peran sangat strategis. LKM mampu menyediakan dana bagi usaha kecil dan mikro dengan persyaratan administratif yang fleksibel sesuai dengan kondisi usaha mikro dan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa LKM mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan usaha kecil dan mikro.

LKM memang mempunyai prospek yang bagus ke depan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Prospek yang bagus ini terlihat dari potensi pasar LKM yaitu jumlah UMK yang besar. Jumlah peminjam pada LKM pada tahun 2004 masih sebesar 9,48 juta, sedangkan jumlah usaha mikro dan kecil yang mencapai lebih 40 juta. Untuk mengembangkan LKM secara berkesinambungan (*sustainable*) harus dikembangkan secara komersial. Hambatan yang dihadapi dalam upaya pengembangan LKM 1) Masalah eksternal, yaitu aspek kelembagaan dimana ada beberapa jenis LK yang tidak jelas kelembagaannya dan pembinaannya. 2) Masalah internal: aspek operasional dan pemberdayaan usaha. Dimana kemampuan LKM dalam menghimpun dana masih terbatas, keterbatasan kemampuan SDM.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2006). *Statistical Yearbook of Indonesia 2005*. Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS. (1999). *Statistical Yearbook of Indonesia 1998*. Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- Didin Wahyudin 2004. *Key Succes Factors In MicroFinancing, paper pada Diskusi Panel Microfinance Revolution: "Future Perspective for Indonesian Market"*, Jakarta, 7 Desember 2004
- Glendoh, Harman Sentot. 2001. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 3, No. 1, Maret 2001: 1 – 13*
- Haryanto, Sugeng. 2006. Persepsi dan pemanfaatan Kredit Oleh Sektor Informal (Studi Kasus pada Pedagang Makanan di Dinoyo dan Seputar Dieng Malang). *Jurnal Keuangan dan Perbankan Th. X Nomor 1 Januari 2006 Hal.: 1-15*
- Ikhshan, M. 2004. Mengembalikan Laju pertumbuhan Ekonomi Dalam Jangka Menengah: Peran Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Analisis Sosial Vol. 9 No. 2 Agustus 2004*.
- Ismawan, Bambang. 2003. Merajut Kebersamaan dan Kemandirian Bangsa Melalui Keuangan Mikro, Untuk Menaggulangi Kemiskinan dan Menggerakkan Ekonomi rakyat. *www.jurnal ekonomi rakyat TH. II No. 6 September 2003 diakses tanggal 10 Februari 2008*.

- Kuncoro, Mudradjad. 2000. *Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan*. Makalah yang disajikan dalam Studium Generale dengan topik “Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil di Indonesia”, di STIE Kerja Sama, Yogyakarta, 18 Nopember 2000.
- Mega, Fakhrukyah. 2004. Melawan Pemiskinan dengan Pilar Ekonomi Berbasis Keadilan dan Kedaulatan. *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 9 No. 2 Agustus 2004
- Riskayanto dan Sulistiowati, Novita. 2008. *Determinan Penyaluran Kredit Pada usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui BPR*. Diakses melalui
- Robinson, M.S., 2002, *The Micro Finance Revolution: Lesson From Indonesia*, Washington DC, The World Bank and Open Society Institute
- Sumodiningrat, Gunawan. 1996. *Pelayanan Kredit yang menjangkau Masyarakat Lapisan Bawah*. Seri Kajian kebijakan Fiskal dan Moneter No. 6 Pusat Pengkajian Fiskal dan Moneter.
- Sudisman, U., & Sari, A. (1996). *Undang-Undang Usaha kecil 1995 dan Peraturan Perkoperasian*. Jakarta: Mitrainfo.
- Syukur, M. 2006. Membangun LKM (LKM) Pertanian yang Berkenajutan: Sebuah Pengalaman Lapang. *Warta Prima Tani*. Volume 1 Nomor 1 Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
- Wijono, Wirjo Wiloejo, 2005. Pemberdayaan LKM Sebagai salah satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit memutus Mata rantai Kemiskinan. *Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisis Khusus November 2005*.